

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 2378/ND/ROREN/PR.08.00/10/2023
 Tanggal : 2 Oktober 2023

Draf Rencana Aksi RB General: Biro Perencanaan dan Kerja Sama

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA		
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA	
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel															
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas)	5	5	1. FGD untuk Penyusunan Rencana Kerja Kemenko PMK dengan RPJMN, RKP, Renstra Kemenko PMK	1	Dokumen	1					1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit
					2. FGD Penajaman Usulan Renja K/L, Sesuai dengan RPJMN, RKP dan Renstra Kemenko PMK	1	Dokumen	1					1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit
					3. Penelahaan Renja K/L dengan seluruh unit kerja	1	Dokumentasi	1					1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit
					4. Penelahaan dan Penelitian RKA-KL Pagu Anggaran, dan Alokasi AnggaranL	1	Dokumentasi				1		1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit
					5. Penyusunan Pedoman Pengelolaan DIPA	1	Dokumen				1		1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit
					6. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Pengelolaan DIPA	1	Dokumentasi				1		1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Operator/ pelaksana
		Nilai SAKIP (Kemen PAN RB)	83,01 (A)	85,01 (A)	1. Optimalisasi aplikasi SIPP dan Laptri sebagai alat pemantauan	4	Laporan	1	1	1	1	4	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit	
					2. Peningkatan kapasitas SDM APIP Instansi	1	Dokumentasi				1		1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Biro Umum dan SDM
					3. Penyusunan pedoman akuntabilitas	1	Dokumen	1					1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja dan Inspektorat
					4. Sosialisasi pedoman pelaporan dan akuntabilitas	1	Dokumentasi Kegiatan		1				1	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja dan Inspektorat

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
					5. Penilaian pelaporan triwulan oleh Tim Penilai KUK	4	Dokumen Laporan dan Nilai Laptri	1	1	1	1	4	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja dan Tim KUK
					6. Pengisian Sismonev	4	Dokumen Laporan	1	1	1	1	4	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan Seluruh Unit

Draf Rencana Aksi RB General: Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA		
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA	
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel															
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas bekerja pegawai (Kemen PAN RB)	75%	100%	1. Melakukan reuiu Kepmenko PMK Nomor 4 tahun 2023 terhdap Permenpan Nomor 7 tahun 2022	1	Dokumen	1				1	Biro Umum & SDM / Biro HUPOK	Kepala Biro Umum& SDM/Kepala Biro HUPOK, Tim Kepegawaian dan Organisasi	
					2. Melakukan FGD Pembahasan mengenai Rancangan Kepmenko PMK Nomor 4 tahun 2023	1	Dokumentasi				1	1	Biro Umum & SDM / Biro HUPOK	Kepala Biro Umum& SDM/Kepala Biro HUPOK, Tim Kepegawaian dan Organisasi	
					3. Penyusunan dan pengesahan Kepmenko PMK Nomor 4 tahun 2023	1	Dokumen		1			1	Biro Umum & SDM / Biro HUPOK	Kepala Biro Umum& SDM/Kepala Biro HUPOK, Tim Kepegawaian dan Organisasi	
					4. Sosialisasi Kepmenko PMK Nomor 4 tahun 2023	1	Dokumentasi				1	1	Biro Umum & SDM / Biro HUPOK	Kepala Biro Umum& SDM/Kepala Biro HUPOK, Tim Kepegawaian dan Organisasi	
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip (ANRI)	69,07 (B) (baseline 2022, sumber: Hasil Pengawasan Kearsipan ANRI 2022)	70	1. Ikut serta dan berkontribusi dalam penggunaan SIKN JIKN	1	Dokumentasi	1				1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM, Tim Arsiparis	
					2. Penyajian arsip secara digital melalui SIKN JIKN	1	Dokumentasi				1		1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
					3. Menyusun rancangan Kebijakan Alih Media	1	Dokumen kebijakan				1		1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
					4. Unit Kearsipan melakukan pemanfaatan arsip bagi kepentingan internal dan eksternal secara digital	1	Dokumentasi	1				1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM	
					5. Menggunakan PMK Cloud sebagai media penyimpanan Arsip Digital	1	Dokumentasi				1	1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM	
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan (LKPBJ)	54,2 (Lampiran Hasil Final ITKP 2022)	71	1. Penginputan Rencana Umum Pengadaan	1	Dokumen	1				1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM	
					2. Pendampingan Pencatatan SPSE	1	Dokumentasi				1	1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM	
					3. Penambahan SDM JF PBJ	1	Dokumen				1	1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM	

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
					4. Penguatan Kelembagaan UKPBJ	1	Dokumen				1	1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	1. Penyusunan Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	2	Laporan	1		1		2	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
					2. Penyusunan Laporan Keuangan	4	Laporan	1	1	1	1	4	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
					3. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan guna Peningkatan Kapasitas dan Kualitas bagi SDM Pengelola Keuangan	1	Dokumen			1		1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
					4. Penyusunan peraturan atau ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan	1	Dokumentasi	1				1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM
		Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,5	96	1. Melakukan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	4	Dokumentasi	1	1	1	1	4	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM, Tim Keuangan
					2. Melakukan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tim Pengelolaan Keuangan	1	Dokumentasi		1			1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM, Tim Keuangan
					3. Penyusunan SK Tim Pengelolaan Keuangan	1	Dokumen	1				1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM, Tim Keuangan
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%	100%	1. Evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana kerja secara berkala	1	Dokumen				1	1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM, Bagian Rumah Tangga
					2. Meningkatkan kualitas penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja	1	Dokumen	1				1	Biro Umum dan SDM	Biro Umum dan SDM, Bagian Rumah Tangga
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional														
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	75%	90%	1. Melaksanakan pengembangan Kompetensi pada Pejabat fungsional	1	Laporan rekapitulasi				1	1	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					2. Penghimpunan SKP dari pegawai	1	Berkas	1					Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					3. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai Kemenko PMK	1	Laporan rekapitulasi				1	1	Biro Umum dan SDM	Instansi Pembina JFT, Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					4. Sosialisasi Permenpan 1 tahun 2023 dan Perka BKN 3 tahun 2023	1	Dokumentasi			1			Biro Umum dan SDM	Kemen PANRB, BKN, Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manaieimen	65%	35%	1. Melakukan Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Non JPT (dilakukan oleh BKN) di	1	Dokumen / dokumen rekapitulasi				1	1	Biro Umum dan SDM	BKN, Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
		Talenta (Kemen PANRB)			Lingkungan KemenkoPMK di Badan Kepegawaian Negara									Kepegawaian Kemenko PMK
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN (Kemen PANRB)	75%	100%	1. Melakukan internalisasi SE Menpan RB 3/2023 di lingkungan KemenkoPMK.	1	Dokumentasi	1				1	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					2. Menyusun e-flayer atau infografis tentang tata cara penetapan predikat sesuai dengan Permen PAN RB 3/2023	1	Dokumen		1			1	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					3. Sosialisasi PermenPANRB 6/2022 dan E-Kinerja	2	Dokumentasi			1	1	2	Biro Umum dan SDM	BKN, Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit (KASN dan BKN)	Hasil Penilaian Kategori Baik	Hasil Penilaian Kategori Baik	1. Integrasi Sistem Informasi kepegawaian terkait data kepegawaian (saat ini kepegawaian sedang menyusun sebuah sistem/aplikasi yang terkait dengan data-data kepegawaian)	1	Dokumen		1			1	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					2. Melakukan Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS Non JPT (dilakukan oleh BKN) di Lingkungan KemenkoPMK di Badan Kepegawaian Negara	1	Dokumentasi				1	1	Biro Umum dan SDM	BKN, Kepala Biro Umum dan SDM, dan tim kepegawaian Kemenko PMK
					3. Pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan secara reguler. Bisa dalam bentuk pemberian penghargaan pegawai teladan	4	Dokumen	1	1	1	1	4	Biro Umum dan SDM & Tim Penilai Pegawai Teladan	Tim Penilai Pegawai Teladan, Kepala Biro Umum dan SDM, dan tim kepegawaian Kemenko PMK
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	55,3% (baseline 2022)	60%	1. Internalisasi: Sosialisasi dan Internalisasi untuk seluruh ASN di lingkungan KemenkoPMK	1	Dokumentasi Kegiatan			1		1	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					2. Penguatan nilai Ber-AKHLAK dengan menjadikannya sebagai salah satu indikator penilaian Pegawai Teladan	4	Laporan	1	1	1	1	4	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK
					3. Pelaksanaan survei Ber-AKHLAK	1	Laporan				1	1	Biro Umum dan SDM	Kepala Biro Umum dan SDM, dan Tim Kepegawaian Kemenko PMK

Draf Rencana Aksi RB General: Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel														
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan birokrasi (Kemen PANRB)	Komposit 5	Komposit 5	1. Menyusun kebijakan terkait evaluasi kelembagaan tingkat Eselon I	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi	
					2. Melakukan evaluasi kelembagaan tingkat Eselon I	1	Dokumen laporan			1		1	Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi	
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital (Kemen PAN RB)	100%	100%	1. Publikasi maklumat pelayanan	1	Dokumen laporan		1			1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
					2. Publikasi dokumen standar layanan	1	Dokumen laporan			1		1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
					3. Penanganan pengaduan masyarakat melalui media digital	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut Pengaduan masyarakat (LAPOR) (Kemen PANRB)	100% Ditindaklanjuti	100% Ditindaklanjuti	1. Melakukan tindak lanjut pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N LAPOR	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
					2. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi SP4N-LAPOR kepada masyarakat	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
					3. Mempercepat laju verifikasi dan tindak lanjut aduan	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
					4. Memberikan jawaban tindak lanjut pengaduan masyarakat yang bersifat substantif untuk menjawab permasalahan pelapor	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik (LAN)	36,63 (baseline 2021, sumber: LAN, dalam tabel hasil antara LHE RB Kemenko PMK 2021)	36,63 (tidak ada penilaian) terdapat perubahan proses penilaian dari LAN	1. Evaluasi Permenko PMK yang berkaitan dengan masyarakat luar yang diundangkan pada tahun 2021 dan 2022	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kepala Biro
					2. Pembuatan system pemantauan perkembangan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum (KemenKUMHAM)	100%	100%	1. Penguatan koordinasi KemenKUMHAM dalam penyusunan Perundang-undangan bidang PMK	1	Dokumen laporan	25%	50%	75%	100%	100%	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	Kepala Biro
					2. Melaksanakan reregulasi, deregulasi, atau penyederhanaan regulasi bidang PMK	1	Dokumen laporan	25%	50%	75%	100%	100%	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
					3. Meningkatkan kompetensi SDM perancang peraturang perundang-undangan	1	Dokumen laporan	25%	50%	75%	100%	100%	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Kemenko PMK)	85 (baseline 2022, 83)	89	1. Pengukuran dan pelaporan SKM secara periodik (2 kali dalam setahun)	2	Dokumen laporan		1		1	2	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
					2. Sosialisasi hasil SKM kepada masyarakat	2	Dokumen laporan		1		1	2	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
		Indeks Pelayanan Publik (Kementerian PANRB)	A (baseline 2022, 4.13)	A	1. Perbaikan Standar Pelayanan Kemenko PMK	1	Dokumen laporan		1			1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
					2. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Layanan	1	Dokumen laporan			1		1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
					3. Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar dan inklusif	1	Dokumen laporan			1		1	Biro Umum	
					4. Pembaharuan data PMK dalam SIPP	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	
					5. Sosialisasi inovasi pelayanan publik	1	Dokumen laporan				1	1	Biro Hukum Persidangan Organisasi & Komunikasi	

Draf Rencana Aksi RB General: Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel														
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE (Kemen PAN RB)	3,5	3,6	1. Melaksanakan evaluasi kebijakan Penyelenggaraan SPBE	1	Dokumen	1					Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Kepala Biro
					2. Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Evaluator SPBE	1	Dokumen Surat Keputusan	1				1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					3. Melaksanakan Reviu Arsitektur SPBE	1	Dokumen		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					4. Melaksanakan Reviu Peta Rencana Strategis SPBE	1	Dokumen		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					5. Menyusun standar pengembangan aplikasi/SPBE	1	Dokumen Laporan		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					6. Melakukan Kegiatan Penilaian Mandiri SPBE	1	Dokumen		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					7. Menyiapkan dokumen Penilaian Mandiri beserta bukti dukung kelengkapannya, sebagai bahan penilaian oleh KemenPANRB	1	Dokumen		1			1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					8. Melakukan koordinasi dengan KemenPANRB terkait verifikasi hasil penilaian mandiri	1	Dokumentasi			1		1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					9. Melakukan persiapan audit keamanan informasi	1	Dokumen				1	1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	NA	NA	1. Melaksanakan kick off meeting arsitektur SPBE Nasional dengan seluruh K/L koordinasi Kemenko PMK	1	Dokumentasi	1				1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
					2. Menyusun rancangan Tim Koordinasi Penyusunan Arsitektur SPBE Bidang PMK	1	Dokumen			1		1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					3. Identifikasi sistem eksisting di masing-masing K/L terkait layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial	1	Dokumen			1		1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					4. Menyusun pemetaan proses bisnis dan integrasi data	1	Dokumen			1		1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					5. Menyusun rencana proses konsolidasi aplikasi di instansi	1	Dokumen				1	1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					6. Koordinasi rutin dengan K/L leading sector (Kemenkes, Kemendikbud, Kemensos) terkait proses penyusunan arsitektur	2	Dokumentasi			1	1	2	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (BPS)	2	2,5	1. Mendaftarkan admin ke BPS	1	Laporan			1		1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					2. Menyusun SK Tim Penilai Internal (TPI)	1	Dokumen Kepmenko			1		1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					3. Menentukan 2 (dua) kegiatan statistik yang akan dinilai;	1	Laporan			1		1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					4. Melakukan Penilaian Mandiri oleh TPI;	1	Dokumen tanggapan			1		1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	
					5. Menyiapkan dokumen hasil penilaian TPI dan dokumen pendukung lainnya sebagai bahan penilaian oleh Tim Penilai Badan (TPB).	1	Dokumen tanggapan			1		1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	

Draf Rencana Aksi RB General: Inspektorat

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel														
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI (Kemen PAN RB)	1 unit kerja WBK	1 unit kerja WBK, 1 unit kerja WBBM	1. Layanan pendampingan implementasi ZI Satker	1	unit kerja/satuan kerja	10%	25%	50%	100%	100%	Inspektorat	Inspektur
					2. Penilaian Mandiri Satker	1	Kegiatan	25%	100%			100%	Inspektorat	Inspektur
					3. Pelaksanaan Survei Mandiri Eksternal	1	Kegiatan	25%	100%			100%	Inspektorat	Inspektur
					4. Reviu oleh TPI atas hasil Penilaian mandiri satker dan pelaksanaan survei mandiri eksternal satker	1	Laporan			1	1	Inspektorat	Inspektur	
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (BPKP)	3,7	3,8	1. Workshop SPIP dan MR	1	Kegiatan	25%	100%			100%	Inspektorat	Inspektur
					2. Analisis dan identifikasi risiko masing-masing unit kerja	1	Dokumen		100%			100%	Inspektorat	Inspektur
					3. Penilaian mandiri oleh asesor unit kerja dan asesor KL	1	Dokumen Laporan		50%	100%		100%	Inspektorat	Inspektur
					4. Penjaminan Kualitas oleh APIP	1	Dokumen Laporan			100%		100%	Inspektorat	Inspektur
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,002 (baseline 2021)	3,19	1. Internalisasi kebijakan anti korupsi		Indeks EPK	10%	25%	50%	100%	100%	Inspektorat	Inspektur
					2. Survei mandiri eksternal terkait persepsi anti korupsi masing-masing unit kerja	1	Dokumen	10%	25%	50%	100%	100%	Inspektorat	Inspektur
					3. ikut serta dalam pelaksanaan survei penilaian integritas KPK RI	1	Dokumen	10%	25%	50%	100%	100%	Inspektorat	Inspektur
		Survei Penilaian Integritas (SPI) (KPK)	83,44	83,50	1. Menyampaikan form keikutsertaan SPI 2023		Indeks SPI	50%	100%			100%	Inspektorat	Inspektur
					2. Menyediakan data responden internal, eksternal, dan expert	1	Dokumen	10%	25%	50%	100%	100%	Inspektorat	Inspektur
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	85%	90%	1. Pendampingan Pemeriksaan BPK	85-90%	Persentase Tindak lanjut		80%		85%	85%	Inspektorat	Inspektur

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
						JUMLAH	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR	PELAKSANA
	Aset				2. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	85-90%	Persentase Tindak lanjut		80%		85%	85%	Inspektorat	Inspektur
					3. Pendampingan Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	1	Laporan				1	1	Inspektorat	Inspektur

Draf Rencana Aksi RB Tematik: Digitalisasi Adm. Pemerintahan untuk Penurunan *Stunting*

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET				KETERKAITAN DGN MASYARAKAT/STAKEHOLDERS UTAMA	UNIT SATUAN PELAKSANA	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV		KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Belum adanya satu aplikasi data stunting yang valid	Tersedianya satu aplikasi data stunting yang valid untuk dimanfaatkan bagi berbagai K/L dari berbagai user	Adanya satu data stunting dari tingkat desa	1 dokumen rekomendasi kebijakan	Melakukan koordinasi lintas K/L pengampu data stunting yang sudah ada (Kementerian kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi)	Dokumen	Jumlah Dokumen		1			Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK
					Merekomendasikan hasil FGD untuk dijadikan kebijakan pusat pengendalian data stunting di pusat dan daerah	Dokumen Rekomendasi Kebijakan	Jumlah Dokumen				1	Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, dan K/L Terkait
2	Belum optimalnya pemanfaatan data stunting dari tingkat desa dan kabupaten	Optimalnya pemanfaatan data stunting dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan	Terefleksinya situasi dan kondisi data tersebut (pemanfaatan data) ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dibuat oleh desa sampai provinsi	Laporan perencanaan dan penganggaran (Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri)	Melakukan koordianasi lintas K/L untuk meningkatkan kapasitas petugas stunting melalui pelatihan untuk memahami penggunaan dan pemanfaatan data	Dokumen	Jumlah Dokumen			1		Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, Kemenkes, Bappenas, Kominfo, Kemendagri, BKKBN

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET				KETERKAITAN DGN MASYARAKAT/ STAKEHOLDERS UTAMA	UNIT SATUAN PELAKSANA	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV		KOORDINATOR	PELAKSANA
		Nasional			Mendorong Kementerian Desa (Dana Desa) dan Kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaatan data stunting dalam perencanaan dan penganggaran	Dokumen	Jumlah Dokumen			1		Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK
3	Masih kurang kapasitas (pengumpulan data, menjaga kualitas, analisis, dan pelaporan) dan kualitas petugas pendataan stunting	Peningkatan kapasitas pengumpulan data dan cara mengumpulkan data yang berkualitas dan lengkap di tingkat desa	Jumlah rekomendasi ke masing-masing K/L teknis pengampu data	Surat Rekomendasi	Mendorong K/L Pengampu untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengumpul data di tingkat desa	Surat Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi		1			Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK
					Merekendasikan penguatan kapasitas tenaga pengumpul data di tingkat Desa	Surat Rekomendasi	Jumlah Dokumen			1		Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Bappenas, Kemenkes, BKKBN
					Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi	Dokumen	Jumlah Dokumen		1			Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Bappenas, Kemenkes, BKKBN, Kominfo

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET				KETERKAITAN DGN MASYARAKAT/ STAKEHOLDERS UTAMA	UNIT SATUAN PELAKSANA	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV		KOORDINATOR	PELAKSANA
		Peningkatan kapasitas untuk verifikasi - validasi, analisis, dan pelaporan dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat	Jumlah rekomendasi ke masing-masing K/L teknis pengampu data	Surat Rekomendasi	Melakukan KSP terkait peningkatan kapasitas verifikasi-validasi, analisis, dan pelaporan di tingkat pusat	Dokumen	Jumlah Dokumen		1			Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK
					Merekendasikan kepada K/L Teknis Pengampu Data	Dokumen	Jumlah Dokumen			1		Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK
					Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi	Dokumen	Jumlah Dokumen			1		Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, Kemendagri, KemendesaPD TT, Bappenas, Kemenkes, BKKB, Kominfo
4	Masih kurangnya prasarana (perlengkapan pengambilan data, komputer/laptop, dan jaringan signal) untuk melakukan pendataan stunting	Rekomendasi pemenuhan kelengkapan pendataan stunting	Kelengkapan (jumlah dan standarisasi) sarana dan prasarana	Laporan kelengkapan sarana dan prasarana K/L teknis	Melakukan KSP terkait rekomendasi pemenuhan pendataan stunting yang meliputi antara lain: 1. Antropometri dan USG terstandar 2. Kuesioner pengumpulan data lain 3. Perangkat keras untuk input data 4. Dukungan jaringan internet 5. Dukungan kuota dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat pusat	Dokumen	Jumlah Dokumen			1		Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, Kemendagri, KemendesaPD TT, Bappenas, Kemenkes, BKKB, Kominfo

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET				KETERKAITAN DGN MASYARAKAT/ STAKEHOLDERS UTAMA	UNIT SATUAN PELAKSANA	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV		KOORDINATOR	PELAKSANA
					Merekendasikan kepada K/L Teknis Pengampu Data dan Penyedia Sarana Prasarana	Dokumen	Jumlah Dokumen			1		Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK
					Melakukan pengawalan tindak lanjut rekomendasi melalui monitoring dan evaluasi	Dokumen	Jumlah Dokumen			1		Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, Kemendagri, KemendesaPD TT, Bappenas, Kemenkes, BKKBN, Kominfo
5	Masih kurangnya partisipasi target sasaran	Meningkatnya partisipasi target sasaran (remaja putri, ibu hamil, calon pengantin)	Peningkatan cakupan target sasaran data dan informasi	1	Melakukan KSP untuk memberikan rekomendasi terkait peningkatan partisipasi target sasaran (remaja putri, ibu hamil, calon pengantin)	Dokumen	Jumlah Dokumen				1	Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenag, Kemenkes, BKKBN, Kominfo, Kemendikbudri stek
6	Pengaturan APBN/APBD/APBDes berubah setiap tahun, sehingga prioritas anggaran untuk Penurunan Angka Stunting fluktuatif setiap tahunnya	Terpetakannya dukungan anggaran dari Dana Desa, APBD Kab/Kota, dan APBD Provinsi, Anggaran Belanja K/L Teknis terkait Stunting (APBN)	Dokumen rekomendasi <i>tagging</i> anggaran nomenklatur APBN/APBD/APBDesa terkait Stunting pada tahun berikutnya bagi Kementerian teknis	1	Melakukan koordinasi lintas K/L untuk melakukan pemetaan nomenklatur anggaran APBN/APBDes terkait penurunan stunting untuk ditagging	Dokumen	Jumlah Dokumen				1	Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri, KemendesaPD TT, Bappenas, Kemenkes, BKKBN

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET				KETERKAITAN DGN MASYARAKAT/STAKEHOLDERS UTAMA	UNIT SATUAN PELAKSANA	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV		KOORDINATOR	PELAKSANA
		Terbangunnya komitmen K/L/Pemerintah Daerah dalam menggunakan APBN/APBD/APBDes	Dokumen pelaporan dari Deputi III PMK yang memuat bahwa K/L/Pemda (dan desa) telah mencantumkan anggaran untuk penurunan angka stunting	1	-Sosialisasi dan advokasi penggunaan APBN/APBDes untuk Penurunan Angka Stunting -Sosialisasi dan advokasi penggunaan APBD Penurunan Angka Stunting	Dokumen	Jumlah Dokumen			1		Tidak terkait	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri, KemendesaPD TT, Bappenas, Kemenkes, BKKBN

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

ASISTEN DEPUTI PENANGANAN KEMISKINAN

NOTA DINAS

Nomor: 2444/D-I/KPS.00.00/10/2023

Yth : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Dari : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
Hal : Penyampaian Peninjauan dan Persetujuan atas Draf Rencana Aksi
Tanggal : 6 Oktober 2023
Tembusan Yth : 1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama No. 2378/ROREN/PR.08.00/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 perihal Permohonan Peninjauan dan Persetujuan atas Draf Rencana Aksi, bersama ini kami sampaikan masukan dalam Peninjauan dan Persetujuan atas Draf Rencana Aksi yang dapat diakses pada link berikut: http://bit.ly/DraftRenaksi2023_KemenkoPMK yang telah di-update terakhir pukul 18.15 sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Asisten Penanganan Kemiskinan,

Ditandatangani secara elektronik
Katiman

RENCANA AKSI RB TEMATIK : PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (PKE)
DEPUTI I - KEMENKO PMK

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	RENCANA AKSI (UPAYA UTK MEWUJUDKAN)	OUTPUT		TARGET				KETERKAITAN DGN MASYARAKAT/ STAKEHOLDERS UTAMA	UNIT SATUAN PELAKSANA	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)		KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Pengaturan APBN/APBD/APBDes berubah setiap tahun, sehingga dapat dimungkinkan prioritas penggunaan anggaran untuk kemiskinan ekstrem tidak tercantum kembali pada klausul regulasi	Tercapainya konvergensi intervensi program yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes	Dokumen rekomendasi perbaikan regulasi pengaturan penggunaan APBN/APBD/APBDes tahun berikutnya bagi Kementerian teknis	1 dokumen pelaporan	Mendorong regulasi penggunaan APBN/APBD/APBDes untuk isu Kemiskinan Ekstrem	Dokumen	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa
		Terpetakannya dukungan anggaran baik untuk pelaksanaan strategi 1, 2, dan 3	Dokumen rekomendasi <i>taging</i> anggaran nomenklatur APBN/APBD tahun berikutnya bagi Kementerian teknis	1 dokumen pelaporan	Disepakatinya <i>taging</i> anggaran nomenklatur APBN/APBD terkait strategi PPKE	Dokumen	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bapenas, KL dalam Inpres 4/2022, KPK dan Kemenpan RB
2	Belum optimalnya penggunaan data P3KE sebagai <i>evidence base</i> PPKE	Tersedianya panduan penggunaan data P3KE	Dokumen panduan penggunaan data P3KE	1 Dokumen	Penyusunan panduan penggunaan data P3KE	Dokumen	Jumlah dokumen	1				Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK dan TNP2K
		Penyediaan Sistem distribusi data P3KE	Webservice data P3KE	1 webservice	Pengembangan webservice data P3KE	Webservice	alamat webservice	1				Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK dan TNP2K
		Terwujudnya pemanfaatan data P3KE bagi K/L/Pemerintah Daerah	Akses K/L dan Pemerintah daerah terhadap data P3KE	1 dokumen pelaporan	Mendistribusikan data P3KE kepada KL dan Pemerintah Daerah	Dokumen laporan	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Kemendagri dan TNP2K
			Kegiatan konsultasi/audiensi	1 dokumen pelaporan	Literasi data dan pendampingan penggunaan data P3KE	Dokumen	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Kemendagri dan TNP2K
		Peningkatan pemanfaatan data P3KE bagi non-pemerintah dan civitas akademik	Akses non-pemerintah dan civitas akademik terhadap data P3KE	1 dokumen pelaporan	Mendistribusikan data P3KE kepada non-pemerintah dan civitas akademik	Dokumen laporan	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Satgas Konvergensi dan TNP2K
		Terwujudnya pengembangan dari aspek fungsional aplikasi	Aplikasi penggunaan Data P3KE	1 aplikasi	Pembuatan aplikasi pengolahan data P3KE	Dokumen	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK dan TNP2K
3	Belum optimalnya monitoring evaluasi pelaksanaan PPKE terhadap K/L/Pemerintah Daerah	Tersedianya sistem pelaporan PPKE Pemerintah Daerah	Sistem pelaporan dapat diakses oleh <i>user</i>	webservice	Penyusunan sistem pelaporan PPKE daerah	Webservice	Jumlah dokumen			1		Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK dan TNP2K
		Penyampaian Pelaporan Pemerintah Daerah terkait PPKE	Peningkatan aspek kualitas laporan dan ketepatan waktu	1 laporan	Penyusunan juknis Pelaporan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen		1			Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK dan TNP2K
				1 laporan	Pendampingan Pelaporan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen		1	1	1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, KEmendagri, Stranas KPK, Kemenpan RB, BPKP dan TNP2K
		Peningkatan jumlah Pemerintah Daerah yang melaporkan		1 laporan	Melakukan monitoring absensi Pemerintah Daerah	Dokumen laporan	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, KEmendagri, Stranas KPK, Kemenpan RB, BPKP dan TNP2K
				1 laporan	Memberikan insentif melalui Kementerian Keuangan	Dokumen laporan	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, KEmenkeu, Kemendagri, TNP2K
		Terfasilitasinya K/L terkait pelaporan PPKE	Tersedianya web monitoring K/L	webservice	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi K/L	Webservice	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Kemenpan RB, dan TNP2K
		Tersedianya hasil hitung kemiskinan ekstrem Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota	Laporan BPS Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota	1 dokumen	Mendorong perhitungan kemiskinan ekstrem di kabupaten dan kota	Dokumen laporan	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Satgas Konvergensi, BPS, TNP2K
		Pemantauan Implementasi intervensi PPKE	Memperoleh <i>evidence based</i> intervensi PPKE	1 dokumen pelaporan	Melakukan kunjungan lapangan dan rapat koordinasi daerah	Dokumen laporan	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, dan seluruh KL inpres 4/2022
4	Belum optimalnya keterpaduan program PPKE	Terselenggaranya koordinasi multipihak	Kesepakatan rumusan kebijakan	1 dokumen	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi implementasi program PPKE di daerah atau bersama K/L	Dokumen laporan	Jumlah dokumen				1	Tidak berkaitan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemenko PMK, Kemenko Ekonomi, Satgas Konvergensi